

IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR DI SMK NEGERI 1 KAIDIPANG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA.”

ANDI ARNIDA ESA PUTRI ABRAM
FEMMY .M.G. TULUSAN
VERY Y. LONDA

Abstract: As one of the programs in place, Smart Indonesia Card is a help from the government for underprivileged / poor students, in the hope of reducing dropouts. Smart Indonesia Program is a priority program of the President of the Republic of Indonesia Ir. Joko Widodo specially designed to help children from poor families or unable to continue to get education services to finish secondary education or equivalent in cooperation with the Ministry of Education and Culture (Kemendikbud), Ministry of Social Affairs (Kemensos) and Ministry of Religious Affairs (Kemenag). Through Indonesia's smart program, smart Indonesian cards have been designed which is a card given to poor and vulnerable poor families whom they wish to send their children to where the child is 6 - 21 years old for free. Already Many high schools in the district Bolaang Mongondow North, one of SMK Negeri 1 Kaidipang. Schools with this vocational base can help as soon as possible the graduates to be able to find a job, but in education is certainly not far from the word cost. Approximately 45% of the students of SMK Negeri 1 Kaidipang who are classified as inadequate families have not received assistance from the Smart Card Indonesia program and those who get the aid do not use the aid with the best. What is the principle of the Smart Indonesia Program in permendikbud number 19 of the year 2016 some less well done. Based on these facts then this research is very important considering the number of children in SMK Negeri 1 Kaidipang who need help to take education. A policy / program is created in response to a problem, which is to solve, reduce, prevent problems from being solved. However, the implementation of a program will not be far from the word problem to be faced in the field, there will be various obstacles to realize the ideals that have been designed. The study aims to explain the implementation of the Smart Card Indonesia program at SMK Negeri 1 Kaidipang Bolaang Mongondow Utara District.

Keywords : *Implementation, program Indonesian smart, smart Indonesian card*

PENDAHULUAN

Program Indonesia Pintar merupakan program prioritas Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo yang dirancang khusus untuk membantu anak dari keluarga miskin atau tidak mampu agar tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah atau sederajat bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Sosial (Kemensos) Dan Kementerian Agama (Kemenag). Melalui program Indonesia pintar, kartu Indonesia pintar telah dirancang yang merupakan sebuah kartu yang diberikan kepada keluarga miskin dan rentan miskin (tidak mampu) yang mana mereka berkeinginan untuk dapat menyekolahkan anaknya yang dimana anak tersebut berusia 6 - 21 tahun secara gratis. Kebijakan pemerintah mengadakan program ini diharapkan dapat membantu anak-anak supaya tidak putus sekolah. Program ini seharusnya berjalan lancar, namun pada kenyataannya masih saja terdapat masalah di berbagai daerah

yang dimana masih banyak anak-anak yang tidak bersekolah karena tidak mendapatkan bantuan tersebut atau mendapatkan bantuan tersebut tetapi menyalahgunakan bantuan itu dengan dipakai pada keperluan di luar kebutuhan sekolah. Sasaran dalam program ini yaitu sebanyak 16.487.872 peserta didik yang diprioritaskan pada anak usia sekolah (6-21 tahun) dari keluarga tidak mampu yang ditetapkan oleh pemerintah, anak usia sekolah (6-21 tahun) dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera/KKS yang telah menerima bantuan Program Indonesia Pintar pada 2015 dari Kemdikbud dan Kemenag, anak usia sekolah (6-21 tahun) dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH), anak usia sekolah (6-21 tahun) yang tinggal di Panti Asuhan/Sosial, siswa/santri (6-21 tahun) dari Pondok Pesantren yang keluarga/rumah tangganya memiliki KKS (khusus untuk PIP Kementerian Agama) maupun melalui jalur usulan Pondok Pesantren (sejenis FUM/Formulir Usulan Madrasah), dan anak

usia sekolah (6-21 tahun) yang terancam putus sekolah karena kesulitan ekonomi dan/atau korban musibah berkepanjangan/bencana alam.

Dalam penerapan program Indonesia pintar, memiliki payung hukum yang dapat dipertanggung jawabkan pelaksanaannya mulai dari pasal 34 ayat (1) disebutkan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara” serta dalam pasal 34 ayat 2 UUD 1945 juga dijelaskan bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat manusia”. UU Nomor 25/2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional yang menyebutkan bahwa janji-janji presiden saat kampanye pemilihan presiden wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur kewajiban Negara, Permendikbud Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar (sebelumnya Permendikbud No. 12 Tahun 2015 tentang program Indonesia pintar).

Sudah Banyak sekolah menengah atas yang ada di kabupaten Bolaang Mongondow Utara, salah satunya SMK Negeri 1 Kaidipang. Sekolah dengan basis kejuruan ini dapat membantu sesegera mungkin tamatan-tamatannya untuk bisa mencari pekerjaan, Namun dalam mengenyam pendidikan tentunya tidak bisa jauh dari kata biaya. Sekitar 45% di antara siswa-siswi SMKN 1 Kaidipang yang tergolong keluarga tidak mampu belum mendapatkan bantuan dari program Kartu Indonesia Pintar dan mereka yang mendapatkan bantuan tersebut tidak memanfaatkan bantuan itu dengan sebaiknya-sebaiknya. Apa yang menjadi prinsip Program Indonesia Pintar di dalam permendikbud nomor 19 Tahun 2016 sebagian kurang terlaksana dengan baik. Berdasarkan fakta tersebut maka penelitian ini sangat penting mengingat banyaknya anak di SMK Negeri 1 Kaidipang yang membutuhkan bantuan guna menempuh pendidikan. Hal inilah yang membuat penasaran dan tanda tanya mengapa belum terealisasikan dengan baik program tersebut di Kabupaten Bolaang Mongondow

Utara. Bagaimana suatu daerah akan maju bila sumber daya manusianya tidak memiliki kualitas pendidikan yang baik. Oleh karena itu, Untuk memastikan Keberhasilan program kartu Indonesia pintar dapat dilihat dari implementasi program KIP dilapangan. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar Di SMK Negeri 1 Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.”

LANDASAN TEORI

Konsep Implementasi

Beberapa definisi lain tentang implementasi yang dikutip dari Rahayu Kusuma Dewi (2016) adalah sebagai berikut :

1. Van Meter dan Van Horn menyebutkan implementasi sebagai proses maka proses implementasi merupakan tindakan yang dilakukan, baik individu maupun unit pemerintahan atau suatu yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.
2. A. Mazmanian dan P.A. Sabatier mengemukakan bahwa implementasi adalah memahami apa yang sesungguhnya terjadi setelah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan.
3. Joko Widodo menyatakan bahwa Implementasi merupakan proses yang melibatkan sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah ataupun swasta (individu atau kelompok). Proses tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan.

Adapun model-model implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut:

1. Mazmanian dan Sabatier dalam Subarsono (2005) menjelaskan bahwa ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni :
 - a. Karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), indikatornya :

- 1) Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan.
 - 2) Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran.
 - 3) Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi.
 - 4) Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.
 - b. Karakteristik kebijakan / undang-undang (*ability of statute to structure implementation*), indikatornya :
 - 1) Kejelasan isi kebijakan.
 - 2) Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis.
 - 3) Besarnya alokasi sumberdaya financial terhadap kebijakan tersebut.
 - 4) Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana.
 - 5) Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana.
 - 6) Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan.
 - 7) Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.
 - c. Variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*), indikatornya :
 - 1) Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi.
 - 2) Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan.
 - 3) Sikap dari kelompok pemilih (*constituency groups*).
 - 4) Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.
2. Charles O. Jones (dalam Siti Erna Latifi Suryana, 2009) mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang digunakan dalam praktek sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan (*goals*), program, keputusan (*decisions*), standar, proposal, dan grand design. Pada tahapan implementasi menurut Charles O. Jones ada 3 (tiga) variabel yang mendukung keberhasilan pencapaian tujuan program, yaitu :
- a. Organisasi, merupakan unit yang digunakan untuk melakukan pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode agar program terlaksana.
 - b. Interpretasi, merupakan aktivitas penterjemahan program ke dalam pengaturan dan pengarahan yang dapat diterima dan dilaksanakan secara tepat.
 - c. Aplikasi, merupakan konsekuensi berupa pemenuhan perlengkapan serta biaya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan program.
3. Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn (dalam Solichin Abdul Wahab: 2016) bahwa untuk dapat mengimplementasikan kebijakan publik secara sempurna (*perfect implementation*) diperlukan beberapa persyaratan. Syarat-syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut :
- a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan yang serius
 - b. Untuk pelaksanaan program, tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai
 - c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
 - d. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh oleh suatu hubungan kausalitas yang andal.
 - e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit rantai penghubungnya.
 - f. Hubungan saling ketergantungan harus kecil.
 - g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan dengan tujuan.
 - h. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
 - i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
 - j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Program dalam Ruang Lingkup Kebijakan Publik

Membahas mengenai program tidak terlepas oleh aspek kebijakan. Salah satu dari sepuluh (10) pengertian kebijakan publik yang dijabarkan oleh Hogwood dan Gunn (dalam Kusuma Dewi:2016) yaitu adanya Program (*as programme*). Adapun Thomas. R. Dye (dalam Kusuma Dewi:2016) mengatakan bahwa *public policy is whatever the government choose to do or not to do* (apa pun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu). Hal tersebut diperkuat oleh Hogwood dan Gunn (dalam Winarno : 2002) yang mengatakan bahwa kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu.

Sedangkan pengertian program itu sendiri, sebagai cara yang disahkan untuk mencapai tujuan dimana melalui hal tersebut bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan demi tercapainya kegiatan pelaksanaan karena dalam program tersebut telah dimuat berbagai aspek yang harus dijalankan agar tujuan program itu sendiri dapat tercapai (Jones dalam Nugroho : 2008). Dalam hal ini, program merupakan suatu upaya pemerintah untuk mewujudkan atau melaksanakan segala kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah.

Dalam Rahayu Kusuma Dewi (2016) dijelaskan bahwa program adalah unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Di dalam program dibuat beberapa aspek, disebutkan bahwa di dalam setiap program dijelaskan mengenai:

1. Tujuan kegiatan yang akan dicapai.
2. Kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan.
3. Aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui.
4. Perkiraan anggaran yang dibutuhkan.
5. Strategi pelaksanaan.

Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperasionalkan. Hal ini sesuai dengan pengertian program yang diuraikan “Program terbaik didunia adalah program yang didasarkan

pada model teoritis yang jelas, yakni: sebelum menentukan masalah sosial yang ingin diatasi dan memulai melakukan intervensi, maka sebelumnya harus ada pemikiran yang serius terhadap bagaimana dan mengapa masalah itu terjadi dan apa yang menjadi solusi terbaik (Charles O. Jones, dalam Nugroho : 2008)”.

Program Kartu Indonesia Pintar

Tujuan Program Kartu Indonesia Pintar

Adapun tujuan Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar adalah salah satu program nasional (yang telah tercantum dalam RPJMN 2015-2019) yaitu :

- a. Meningkatkan angka partisipasi pendidikan dasar dan menengah.
- b. Meningkatkan angka keberlanjutan pendidikan yang ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah dan angka melanjutkannya.
- c. Menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat, terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan, antara wilayah perkotaan dan perdesaan dan antar daerah.
- d. Meningkatkan kesiapan siswa pendidikan menengah untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.

Manfaat Program Kartu Indonesia Pintar

- a. Kartu Indonesia Pintar (KIP) diberikan sebagai penanda dan digunakan untuk menjamin serta memastikan seluruh anak usia sekolah (6-21 tahun) dari keluarga pemegang KKS untuk mendapatkan manfaat Program Indonesia Pintar bila terdaftar di Sekolah, Madrasah, Pondok Pesantren, Kelompok Belajar (Kejar Paket A/B/C) atau Lembaga Pelatihan maupun Kursus.
- b. Untuk tahap awal di 2014, Kartu Indonesia Pintar telah dicetak untuk sekitar 160 ribu siswa di sekolah umum dan juga madrasah di 19 Kabupaten/Kota. Untuk 2015, diharapkan KIP dapat diberikan kepada 20,3 juta anak usia sekolah baik dari keluarga penerima Kartu Keluarga

Sejahtera (KKS) atau memenuhi kriteria yang ditetapkan (seperti anak dari keluarga peserta PKH).

- c. Kartu Indonesia Pintar juga mencakup anak usia sekolah yang tidak berada di sekolah seperti Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti anak-anak di Panti Asuhan/Sosial, anak jalanan, dan pekerja anak dan difabel. KIP juga berlaku di Pondok Pesantren, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan Lembaga Kursus dan Pelatihan yang ditentukan oleh Pemerintah.
- d. Kartu Indonesia Pintar mendorong pengikut-sertaan anak usia sekolah yang tidak lagi terdaftar di satuan pendidikan untuk kembali bersekolah.

Kartu Indonesia Pintar menjamin keberlanjutan bantuan antar jenjang pendidikan sampai tingkat SMA/SMK/MA

Besaran Kartu Indonesia Pintar

Sasaran Kartu Indonesia Pintar adalah sebanyak 16.487.872 peserta didik dengan rincian sebagai berikut :

Jenjang Pendidikan	Sasaran KIP
SD/Paket A	9.528.732
SMP/PAket B	4.019.090
SMA/Paket C	1.243.415
SMK/Kursus dan Pelatihan	1.696.635
Jumlah	16.487.872

Tabel 1. Sasaran KIP (<http://www.panduandapodik.id>) (2017)

Besaran dana kartu Indonesia Pintar diberikan per peserta didik dari masing-masing direktorat teknis, adalah sebagai berikut:

- a. Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD)/Paket A:
 - 1) Para Peserta didik yang berada di Kelas I, II, III, IV dan V pada Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk dua semester sekaligus sebesar Rp 450.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - 2) Para Peserta didik yang berada Kelas VI pada Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp.225.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

- 3) Para Peserta didik yang berada di Kelas II, III, IV, V dan VI pada Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk dua semester sebesar Rp 450.000,00 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- 4) Para Peserta didik yang berada Kelas I Tahun Pelajaran 2017/2018 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp.225.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
- b. Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Paket B:
 - 1) Para Peserta didik yang berada di Kelas VII dan VIII pada Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk satu tahun sebesar Rp750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - 2) Para Peserta didik yang berada Kelas IX pada Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp375.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
 - 3) Para Peserta didik yang berada do Kelas VIII dan IX pada Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk satu tahun sebesar Rp750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
 - 4) Para Peserta didik yang berada Kelas VII pada Tahun Pelajaran 2017/2018 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp375.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
- c. Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Paket
 - 1) Para Peserta didik yang berada Kelas X dan XI pada Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk satu tahun sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).
 - 2) Para Peserta didik yang berada Kelas XII pada Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah).
 - 3) Para Peserta didik yang berada di Kelas XI dan XII pada Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk satu tahun sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).

- 4) Para Peserta didik yang berada di Kelas X pada Tahun Pelajaran 2017/2018 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah).
- d. Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK):
- 1) Untuk Program 3 Tahun
 - a) Para Peserta didik SMK yang berada di Kelas X dan XI pada Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk satu tahun sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).
 - b) Para Peserta didik SMK yang berada di Kelas XII pada Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp500.000,00; (Lima Ratus Ribu Rupiah).
 - c) Para Peserta didik SMK yang berada di Kelas XI dan XII pada Tahun Pelajaran 2017/2018 diberikan dana untuk satu tahun sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).
 - d) Para Peserta didik SMK yang berada di Kelas X pada Tahun Pelajaran 2017/2018 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp500.000,00. (Lima Ratus Ribu Rupiah).
 - 2) Untuk Program 4 tahun
 - a) Para Peserta didik SMK yang berada di Kelas X, XI dan XII pada Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk satu tahun sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah).
 - b) Para Peserta didik SMK yang berada di Kelas XIII pada Tahun Pelajaran 2016/2017 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah).
 - c) Peserta didik SMK Kelas XI, XII dan XIII Tahun Pelajaran 2017/2018 diberikan dana untuk satu tahun sebesar Rp1.000.000,00;
 - d) Para Peserta didik SMK yang berada di Kelas X Tahun pada Pelajaran 2017/2018 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah).
 - e. Untuk Lembaga kursus dan pelatihan

Untuk Anak usia sekolah (mulai dari usia 16 sampai dengan 21 tahun) pemegang KIP yang tidak bersekolah namun sudah mendaftar dan aktif mengikuti pembelajaran lembaga kursus dan pelatihan seperti di SKB/PKBM/LKP atau satuan pendidikan nonformal yang lainnya dan telah terdaftar dibawah naungan dari binaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, akan diberikan dana program Indonesia pintar (PIP) sebesar Rp1.000.000,00 selama peserta didik tersebut mengikuti kursus terstandar dalam waktu satu periode kursus dalam satu tahun tanpa mempertimbangkan lamanya waktu kursus yang akan ditempuh.

Pemanfaatan Program Kartu Indonesia Pintar

Program Kartu Indonesia Pintar ditujukan untuk membantu biaya pribadi peserta didik agar dapat terus melanjutkan pendidikannya sampai selesai jenjang pendidikan menengah. Dana bantuan diberikan langsung kepada siswa dengan untuk pemanfaatan sebagai berikut:

- a. Pembelian buku dan alat tulis sekolah
- b. Pembelian pakaian dan perlengkapan sekolah (sepatu, tas, dll)
- c. Transportasi siswa ke sekolah
- d. Uang saku siswa ke sekolah
- e. Biaya kursus/les tambahan

Dasar Hukum Program Kartu Indonesia Pintar

- a. Undang- Undang Dasar Negara Tahun 1945
- b. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
- d. Permendikbud Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Didalam penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif. Seperti yang

dijabarkan oleh Creswell (2010) yang dikutip dari Jamaluddin Ahmad (2015), Mengemukakan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial dan kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema yang umum, dan menafsirkan makna data. Laporan akhir untuk penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel. Artinya penulis akan memaparkan data secara ilmiah yang diperoleh dari fakta dilapangan serta mengolah dan menganalisis dari data-data yang sudah terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur dan terstruktur dan mempunyai makna.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program kartu Indonesia Pintar di SMKN 1 Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Dengan menggunakan teori implementasi yang digunakan oleh Charles O. Jones (dalam Siti Erna Latifi Suryana, 2009) mendefinisikan bahwa kebijakan publik sebagai kebijakan yang digunakan dalam praktek sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan (goals), program, keputusan (decisions), standar, proposal, dan grand design. Pada tahapan implementasi menurut Charles O. Jones ada 3 (tiga) variabel yang mendukung keberhasilan pencapaian tujuan program, yaitu organisasi, interpretasi, aplikasi/ penerapan. Adapun fokus pada penelitian yang menggunakan teori dari Charles O. Jones, yaitu :

1. Pembentukan atau penataan kembali sumber daya , unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan.
2. Pemahaman program terhadap pihak pelaksana (sekolah), penerima

(siswa/siswi), dan pandangan tokoh masyarakat.

3. Pelaksanaan standar operasional prosedur.

Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat dimana proses studi yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian. Tempat penelitian tergantung pada bidang ilmu yang melatarbelakangi studi tersebut. Setting pada penelitian harus jelas sehingga dapat melakukan penelitian dengan efektif dan akurat (Sukardi, dalam Jamaluddin : 2015). Sesuai dengan pengertian diatas, Penelitian yang berjudul “Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar di SMKN 1 Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara”. Lokasi SMK Negeri 1 Kaidipang di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sengaja peneliti pilih karena ingin memperdalam serta mengkaji lebih dalam lagi mengenai implementasi program kartu Indonesia Pintar di sekolah tersebut. Selain itu, peneliti juga berharap akan mendapatkan temuan yang berguna dalam pemecahan masalah dari permasalahan yang terjadi dalam pengimplementasian Kartu Indonesia Pintar itu di SMK Negeri 1 Kaidipang. Sehingga program Kartu Indonesia Pintar dapat diterima, dimengerti, dan diimplementasikan secara baik.

Jenis Data

Jenis data yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dan terlibat langsung dengan objek penelitian maupun melalui pengamatan secara langsung terhadap Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar. Data tersebut berupa program , proses administrasi dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian tujuan program kartu Indonesia pintar di lapangan.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau data yang telah tersedia dari hasil pengumpulan data instansi terkait dengan objek penelitian. Data ini diperoleh dari Dapodik di SMK

Negeri 1 Kaidipang dan Dapodik di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Informan Penelitian

Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Mengingat metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif maka peneliti erat kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual, jadi tujuan informan dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan informal sebanyak-banyaknya untuk menunjang penelitian ini.

Dari penelitian ini, informan terdiri dari Sembilan (9) orang sebagai berikut :

1. Kepala Sekolah SMKN 1 Kaidipang : 1 orang
2. Operator Dapodik SMKN 1 Kaidipang : 1 orang
3. Operator Dapodik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bolaang Mongondow Utara : 1 orang
4. Orang tua siswa : 3 orang
5. Siswa : 3 orang

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang diinginkan (Sugiyono, 2010). Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan, maka data diperoleh melalui :

1. Observasi Langsung

Observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti. Menurut Moleong (2017) secara metodologis bagi penggunaan pengamatan ialah: pengamatan mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, kebiasaan, dan sebagainya; pengamatan memungkinkan pengamat untuk melihat dunia sebagaimana dilihat oleh subyek peneliti, hidup pada saat itu, menangkap kehidupan budaya dari segi

pandangan dan anutan para subyek pada keadaan waktu itu; pengamatan memungkinkan peneliti merasakan apa yang dirasakan dan dihayati oleh subyek sehingga memungkinkan pula peneliti menjadi sumber data; pengamatan memungkinkan pembentukan pengetahuan yang diketahui bersama, baik dari pihaknya maupun dari pihak subyek.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2017). Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada pihak-pihak terkait implementasi Kartu Indonesia Pintar, yaitu pelaksana langsung program KIP di SMK Negeri 1 Kaidipang dan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bolaang Mongondow Utara, serta orang tua siswa dan siswa guna mendapatkan berbagai informasi menyangkut masalah yang diajukan dalam penelitian.

3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan proses melihat kembali sumber-sumber data dari dokumen yang ada untuk memperluas data-data tentang hasil laporan kegiatan program pendukung aplikasi instrumentasi yang telah dilakukan. Yang menjadi dokumentasi dalam hal ini adalah potret lingkungan SMK Negeri 1 Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Teknik Analisa Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, sehingga teknik analisis data yang digunakan ialah analisis kualitatif. Adapun model analisis data yang digunakan ialah model analisis interaktif (Miles dan Huberman dalam Rohidi dan Mulyarto, 2007)

1. Pengumpulan data; yaitu dengan melakukan wawancara terhadap narasumber data/informan dengan berpedoman pada pertanyaan-pertanyaan yang dipersiapkan terlebih dahulu.

2. Reduksi data; ialah proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data ini berlangsung secara terus menerus selama penelitian berlangsung, dan dilanjutkan setelah data terkumpul dengan membuat ringkasan, menelusuri tema dan menggolongkannya ke dalam suatu pola yang lebih jelas.
3. Penyajian data. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif. Menurut model analisis ini, agar dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian, maka penyajian data harus diusahakan secara sistematis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Organisasi

Sumber daya yang dimiliki oleh SMK Negeri 1 Kaidipang adalah penunjang terlaksananya program kartu Indonesia pintar di sekolah. Sumber daya yang tersedia adalah sumber daya manusia dan metode. Pelaksana tugas di sekolah untuk menangani program kartu Indonesia pintar ialah operator dapodik yang juga merupakan seorang guru mata pelajaran di SMK Negeri 1 Kaidipang. Tidak adanya tim koodinator atau kepanitiaan untuk melaksanakan tugas ini di sekolah di karenakan kurangnya tenaga kerja di sekolah, sehingga mengharuskan salah satu guru mata pelajaran merangkap tugas menjadi operator dapodik yang juga harus menangani program kartu Indonesia pintar di sekolah. Untuk mempermudah pendataan di sekolah, operator dapodik melakukan sosialisasi dan membuat formulir data yang akan di isi oleh siswa-siswa yang memiliki kartu Indonesia pintar.

Di cabang dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi juga melakukan hal yang sama, tidak adanya pembentukan atau tidak dibentuknya tim koordinator atau

kepanitiaan dalam melaksanakan program kartu Indonesia pintar. Staf pegawai yang bertugas sebagai operator dapodik juga sudah merangkap yang menangani program kartu Indonesia pintar.

Di SMK Negeri 1 Kaidipang 57 siswa-siswi telah menerima bantuan dana program kartu Indonesia pintar dan 234 siswa yang diajukan lewat sekolah yang layak menerima program Indonesia pintar. Dalam besaran dana yang diterima oleh siswa penerima dana program kartu Indonesia pintar sudah sesuai dengan yang telah ditentukan.

2. Interpretasi

Operator dapodik SMK Negeri 1 Kaidipang yang juga merupakan pelaksana program kartu Indonesia pintar memahami program kartu Indonesia pintar lewat internet dan tidak ada pelatihan atau sosialisasi khusus yang dilakukan oleh cabang dinas pendidikan dan kebudayaan untuk lebih memperdalam lagi pemahaman operator dapodik sekolah sebagai pelaksana tunggal di SMK Negeri 1 Kaidipang. Siswa dapat memahami tentang program kartu Indonesia dari sosialisasi yang dilakukan oleh operator dapodik di sekolah.

Sedangkan pemahaman orang tua mengenai program kartu Indonesia pintar masih sangat sedikit. Para orang tua siswa kurang memahami program kartu Indonesia pintar karena tidak adanya sosialisasi.

3. Aplikasi/penerapan

Sasaran program kartu Indonesia pintar di SMK Negeri 1 Kaidipang sudah tepat sesuai yang telah di atur dalam Permendikbud Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar. Hanya saja dalam pemanfaatan dana program kartu Indonesia pintar oleh siswa-siswi di SMK Negeri 1 Kaidipang sebagian masih menyimpang belum sesuai dengan yang seharusnya.

Pembahasan hasil penelitian

Setelah dirangkum, hasil penelitian kemudian akan di deskripsikan sesuai dengan indikator implementasi dari Charles O. Jones dalam Siti Erna Latifi Suryana (2009) yakni sebagai berikut:

1. Organisasi

Pengorganisasian merupakan pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjalankan program agar bisa berjalan, menurut Charles O. Jones (Arif Rohman,2001). Pengorganisasian meliputi sumber daya, sarana dan prasana, dan keuangan. Sumber daya manusia yang dimiliki oleh SMK Negeri 1 Kaidipang masih sangat minim di karenakan tenaga kerja guru yang masih sedikit. Hal itu pula yang menjadi alasan tidak terbentuknya tim koordinator atau kepanitiaan dalam menangani program kartu indonesia pintar. Tidak adanya kepanitiaan untuk menangani program kartu Indonesia pintar berdampak pada operator dapodik yang juga merupakan salah seorang guru mata pelajaran di SMK Negeri 1 Kaidipang harus merangkap tugas. Selain itu, operator dapodik di SMK Negeri 1 Kaidipang yang menangani agar terlaksananya program kartu Indonesia pintar di sekolah. Sebagai seorang guru yang juga harus mengurus dapodik serta menangani program kartu Indonesia pintar di sekolah itu merupakan tugas yang sangat berat, karena terlepas dari itu semua operator dapodik juga merupakan seorang kepala keluarga yang harus membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga.

Tugas dari operator dapodik di SMK Negeri 1 Kaidipang yaitu, melakukan sosialisasi ke siswa-siswa saat apel dan dilanjutkan ke kelas-kelas jika memungkinkan, mendata siswa calon penerima bantuan dana program kartu Indonesia pintar, dan mengirimkan data tersebut ke cabang dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi. Operator dapodik harus rutin melakukan pengecekan terhadap siswa-siswa agar cepat

memasukkan formulir pendataan dan juga berkas lainnya yaitu fotocopy kartu Indonesia pintar beserta surat keterangan tidak mampu agar proses pengiriman data ke pusat bisa serentak. Nantinya pihak sekolah akan mengalami proses berhenti. Proses berhenti ini berlangsung sampai dengan Surat Keputusan siswa penerima bantuan program kartu Indonesia pintar sudah diterima oleh sekolah dan dimulai kembali proses selanjutnya, yaitu mengundang siswa penerima bantuan program kartu Indonesia pintar untuk diberikan informasi mengenai hal terkait.

Data yang telah dikumpulkan oleh operator dapodik di SMK Negeri 1 Kaidipang kemudian dikirim ke cabang dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi. Sama halnya dengan keadaan di SMK Negeri 1 Kaidipang, di cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi juga tidak mempunyai tim koordinator atau kepanitiaan yang akan menangani program kartu Indonesia pintar. Yang melaksanakan program kartu Indonesia di cabang dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi yaitu operator dapodik. Data yang dikirim oleh operator dapodik SMK Negeri 1 Kaidipang selanjutnya akan di upload/dikirim ke pusat di Kementerian pendidikan dan kebudayaan. Setelah mengirimkan data-data siswa tersebut, operator dapodik cabang dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi tinggal menunggu surat keputusan dari pusat dan akan meneruskannya ke sekolah.

Sarana dan prasarana yang digunakan oleh sekolah juga sangat terbatas dan tidak ada bantuan sarana dan prasarana apapun dari cabang dinas pendidikan dan kebudayaan untuk menunjang terlaksananya program kartu Indonesia pintar. Sarana dan prasarana yang digunakan oleh sekolah yang menjadi penunjang program kartu Indonesia pintar yaitu formulir pendataan. Formulir pendataan ini selanjutnya akan diisi oleh para siswa yang mempunyai kartu Indonesia pintar. Sarana dan prasarana lain yang di gunakan oleh

operator dapodik SMK Negeri 1 Kaidipang adalah laptop milik pribadi operator dapodik, dan sosialisasi.

Sosialisasi dilakukan saat mulai tahun ajaran baru, selain itu sosialisasi juga dilakukan saat siswa-siswa apel. Setelah itu, bagi siswa yang mempunyai kartu Indonesia pintar akan mengisi form calon penerima bantuan program kartu Indonesia pintar yang dilengkapi dengan fotocopy kartu Indonesia pintar dan surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari desa mereka tinggal. Sosialisasi merupakan satu-satunya cara untuk memberitahukan siswa-siswi tentang program kartu Indonesia pintar di sekolah. Adapun sosialisasi ini menurut siswa-siswa tidak rutin dilakukan. Siswa penerima bantuan program kartu Indonesia pintar di SMK Negeri 1 Kaidipang berjumlah 57 siswa dari kelas X hingga kelas XII yang seluruhnya memiliki kartu Indonesia pintar. Selain itu, pihak sekolah juga mengusahakan untuk mengajukan siswa-siswa yang layak menerima bantuan program kartu Indonesia pintar. Tercatat di SMK Negeri 1 Kaidipang ada 234 siswa yang diajukan sekolah untuk kiranya bisa mendapatkan bantuan dana dari program kartu Indonesia pintar. Namun, sampai sekarang siswa-siswa yang diajukan oleh sekolah belum ada hasil.

Besaran dana yang diterima oleh siswa penerima bantuan dana program kartu Indonesia pintar sudah sesuai dengan yang telah di tentukan. Di SMK Negeri 1 Kaidipang, ada yang menerima bantuan sebesar Rp. 500.000 dan Rp. 1.000.000. Untuk kelas X dan XI menerima bantuan dana sebesar Rp. 500.000, sedangkan kelas XII menerima bantuan sebesar kelas Rp. 1.000.000. Dana tersebut akan mereka pakai untuk keperluan di sekolah.

2. Interpretasi

Pemahaman operator dapodik SMK Negeri 1 Kaidipang sebagai salah satu pelaksana program kartu Indonesia pintar tentang program kartu Indonesia pintar memahami secara otodidak. Mempelajari

serta memahami program kartu Indonesia pintar lewat browsing internet merupakan usaha sendiri yang dilakukan oleh operator dapodik di SMK Negeri 1 Kaidipang. Tidak adanya pelatihan khusus atau sosialisasi yang dilakukan oleh cabang dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi menjadi alasan operator dapodik di SMK Negeri 1 Kaidipang harus memahaminya secara otodidak.

Siswa-siswa di sekolah SMK Negeri 1 Kaidipang mendapatkan pengetahuan tentang program kartu Indonesia pintar lewat sosialisasi yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam hal ini operator dapodik sebagai pelaksana program kartu Indonesia pintar. Sosialisasi dilakukan tidak rutin namun kiranya dapat membantu siswa untuk memahami program tersebut.

Cabang dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi sendiri tidak pernah melakukan sosialisasi terhadap siswa maupun orang tua. Operator dapodik di cabang dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi tentunya juga tidak bisa mengerjakannya sendiri, mengingat operator dapodik hanya seorang diri.

Pemahaman orang tua mengenai program kartu Indonesia pintar masih sangat minim. Orang tua siswa hanya mengetahui bahwa kartu Indonesia pintar dapat digunakan untuk mendapatkan bantuan dana dari pemerintah. Kurangnya pemahaman orang tua siswa tentang program kartu Indonesia pintar karena pihak sekolah terlebih lagi cabang dinas pendidikan dan kebudayaan tidak pernah melakukan sosialisasi. Kurang adanya interaksi membuat hanya pihak-pihak tertentu saja yang memahami tentang program kartu Indonesia pintar. Pemahaman sebagian siswa juga tidak begitu merata karena tidak pernah dilaksanakan sosialisasi dari pemerintah dalam hal ini cabang dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi.

3. Aplikasi / Penerapan

Aplikasi merupakan faktor berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, pembayaran, atau lainnya yang

disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program, menurut Charles O. Jones (Arif Rohman, 2001). Kartu Indonesia pintar merupakan bantuan pendidikan guna mendukung program Wajib Belajar bertujuan untuk meringankan beban biaya yang terlalu berat bagi orang tua yang berasal dari status ekonomi bawah. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam bersekolah dan mencegah anak putus sekolah.

Di SMK Negeri 1 Kaidipang kartu Indonesia pintar ditujukan kepada siswa dari keluarga miskin atau kurang mampu yang kondisi perekonomiannya tidak bisa mencukupi kebutuhan dalam membiayai anak-anak mereka. Penggunaan dana dari Kartu Indonesia Pintar untuk pembelian buku dan alat tulis sekolah, seragam sekolah, transportasi siswa ke sekolah, uang saku siswa, serta biaya les tambahan siswa.

Pengalokasian dana Kartu Indonesia Pintar ditujukan untuk membiayai pendidikan anak dari keluarga miskin atau kurang mampu agar mereka mampu bersekolah layak sama seperti anak lainnya. Kegunaan dana tersebut untuk membeli seragam sekolah, alat tulis, uang saku, dan transportasi siswa pergi ke sekolah. Besaran dana yang diperoleh siswa adalah Rp.500.000 untuk kelas X dan kelas XI, serta Rp. 1.000.000 untuk kelas XII berupa uang tunai langsung diberikan pada siswa. Ada 57 siswa di SMK Negeri 1 Kaidipang yang telah menerima bantuan dari program kartu Indonesia pintar. Berdasarkan hasil dari pengamatan, siswa yang menerima bantuan kartu Indonesia pintar telah memenuhi sekurang-kurangnya satu kriteria dari berbagai kriteria yang telah ditentukan. Kepemilikan Kartu Indonesia Pintar juga sudah sesuai dengan keadaan dan kondisi keluarga siswa, karena syarat kepemilikan kartu Indonesia pintar tersebut juga ditentukan dari kepemilikan kartu perlindungan sosial (KPS).

Siswa penerima bantuan dana di SMK Negeri 1 Kaidipang sudah memenuhi syarat yaitu kondisi pekerjaan orang tua mereka dan tempat tinggalnya yang masih kurang sejahtera. Tempat tinggal mereka yang dapat dikatakan jauh dari jarak rumah ke sekolah juga menandakan bahwa bantuan KIP sudah tepat sasaran. Namun, pihak sekolah tidak ikut campur dalam pengambilan keputusan seluruhnya tentang penentuan sasaran penerima Kartu Indonesia Pintar, hanya saja di sekolah sasaran dapodik yaitu mereka yang mempunyai kartu Indonesia pintar dan dilengkapi oleh surat keterangan tidak mampu (SKTM) dari desa mereka tinggal. Dalam pemanfaatan dana program kartu Indonesia pintar yang diterima oleh siswa di SMK Negeri 1 Kaidipang menurut hasil penelitian sebagian siswa masih belum tau menggunakan dana itu seluruhnya untuk keperluan sekolah. Sebagian siswa penerima bantuan kartu Indonesia pintar menggunakan dana tersebut untuk keperluan sehari-hari yang bukan keperluan sekolah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan penulis di SMK Negeri 1 Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar di SMK Negeri 1 Kaidipang :

1. Organisasi. Pengorganisasian dalam implementasi kartu Indonesia pintar di SMK Negeri 1 Kaidipang telah dilaksanakan. Operator dapodik di SMK Negeri 1 Kaidipang yang juga seorang guru mata pelajaran merupakan pelaksana yang menangani program Kartu Indonesia pintar. 57 siswa yang sudah menerima bantuan dari program kartu Indonesia pintar dan sebagian dari siswa yang kurang mampu yang belum mendapatkan kartu Indonesia pintar diajukan oleh pihak sekolah agar bisa mendapatkan kartu Indonesia pintar dan bisa mendapatkan bantuan dana dari program kartu Indonesia pintar. Tidak ada sarana dan

- prasarana yang begitu menunjang dalam pelaksanaan program kartu Indonesia pintar, serta tidak dibentuknya tim koordinator atau kepanitiaan dalam melaksanakan program tersebut. Besaran dana yang diterima oleh siswa penerima sudah sesuai dengan aturan dari kebijakan yang telah ditentukan.
2. Interpretasi. Pemahaman para pelaksana masih terbatas karena tidak adanya pelatihan dan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini, cabang dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi. Pemahaman siswa selaku penerima bantuan program kartu Indonesia pintar di dapat hanya melalui sosialisasi yang dilakukan oleh operator dapodik di sekolah. Sedangkan orang tua siswa masih kurang memahami tentang program kartu Indonesia pintar.
 3. Aplikasi / penerapan. Sasaran dari program kartu Indonesia pintar di SMK Negeri 1 Kaidipang sudah memenuhi syarat. Melihat para siswa penerima bantuan memang berasal dari keluarga yang tidak mampu. Mereka menggunakan dana bantuan tersebut untuk pembelian buku dan alat tulis sekolah, seragam sekolah, transportasi siswa ke sekolah, dan uang saku siswa. Besaran dana yang diterima oleh siswa-siswa penerima bantuan sudah sesuai dengan besaran dana yang seharusnya mereka terima.

Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di SMK Negeri 1 Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara penulis memberikan saran-saran yang dapat memperbaiki implementasi kartu Indonesia pintar di SMK Negeri 1 Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, diantaranya :

1. Seharusnya ada panitia khusus atau tim koordinator yang menangani program kartu Indonesia pintar di sekolah maupun di kantor cabang dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi agar lebih memudahkan proses pendataan sampai penginputan data siswa-siswa ke pusat.
2. Baiknya ada tim survey ke rumah siswa-siswa calon penerima bantuan program kartu Indonesia pintar agar dapat mengetahui

apakah siswa tersebut sudah memenuhi syarat dalam sasaran di program kartu Indonesia pintar.

3. Sosialisasi harus lebih sering dilakukan untuk siswa maupun untuk orang tua siswa agar mereka bisa lebih memahami tentang program kartu Indonesia pintar baik mengenai prosedur, sasaran, hingga pemanfaatan yang sebenarnya di program kartu Indonesia pintar.
4. Baiknya ada pelaporan dan evaluasi oleh siswa mengenai pemanfaatan dana program kartu Indonesia pintar yang mereka terima.
5. Sebaiknya disediakan kontak atau kotak pengaduan untuk siswa-siswi agar saran dan kritik mereka yang tidak bisa mereka katakan langsung bisa tersalurkan lewat sarana pengaduan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Jamaluddin. 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik : Teory dan Aplikasi*. Yogyakarta. Gava Media.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung. Cv Pustaka.
- Bungin, Burhan. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Pertama*. Jakarta. Kencana Perdana Media Group.
- Dewi, Rahayu. 2016. *Studi Analisis Kebijakan*. Bandung. Pustaka Setia.
- Idi, Abdullah. 2013. *Sosiologi Pendidikan Individu, Masyarakat, dan Pendidikan*. Jakarta. Rajawali Press.
- Indiahono, Dwiyanto. 2017. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta. Gava Media.
- Miles. M. B. dan Humberto. A. M. 2007. *Analisi data kualitatif. Buku sumber tentang metode-metode baru. Terjemahan tjetjep roehadi rohidi. Pendamping, Mulyarto. Cet.1*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho. R. 2008. *Public Policy: Teori kebijakan-Analisis kebijakan-Proses*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Pasolog, Harbani. 2013. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung. Alfabeta.

Pasolog, Harbani, 2016. *Teori Administrasi Publik*. Bandung. Alfabeta.

Patilima, Hamid. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta.

Purwanto, Erwan Agus (dkk). 2012. *Implementasi Kebijakan Public: Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia*. Yogyakarta. Gava Media.

Rohman, Arif. 2014. *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

Tilaar, H.A.R & Nugroho, Riant. 2008. *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Wahab, Solichin. 2016. *Analisis Kebijakan : dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta. Bumi Aksara.

Winarno. B. 2012. *Kebijakan Publik(Teori,proses, dan studi kasus komparatif)*. Yogyakarta: CAPS.

Widodo, Joko. 2006. *Analisis kebijakan publik konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*. Malang : Bayumedia Publishing.

Sumber Lain :

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 2012. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta. Sekretariat Jenderal MPR RI

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 2012. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*. Jakarta. Sekretariat Jenderal MPR RI

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 *Tentang Program Indonesia Pintar*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 *Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*

Syarat, Prioritas Penerima dan Besaran Dana PIP Tahun 2017 - panduandapodik.id_files

Kartu Indonesia Pintar - Program Membangun Keluarga Produktif - Program _ Tim Nasional

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan - TNP2K.html

Pengertian Kartu Indonesia Pintar (KIP), Manfaat dan Siapa yang Berhak Menerima.html